

**KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH  
(STUDI DESKRIPTIF PEMEKARAN RW IV KELURAHAN  
PENJARINGANSARI KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**



Fis P 08/08

Bud  
K

**DISUSUN OLEH  
ASTANTO AL BUDIMAN  
070317078**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2008**

Departemen Pendidikan Nasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga  
Surabaya

### Abstrak

Nama : Astanto Al Budiman  
NIM : 070317078  
Judul : Konflik Pemekaran Wilayah (Studi Deskriptif Rencana Pemekaran RW IV Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Surabaya)  
Halaman : ix + 109 halaman + 10 lembar lampiran  
Pustaka : 1984 – 2004  
17 buku, 1 skripsi, artikel koran 4 eksemplar, internet

Penelitian ini berjudul Konflik Pemekaran Wilayah (Studi Deskriptif Rencana Pemekaran RW IV Kelurahan Penjaringansari Surabaya), yang bertujuan untuk memberi gambar mengenai konflik yang sedang terjadi. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya konflik di RW IV yang berujung pada rencana pemekaran wilayah, bagaimana cara masing-masing pihak dalam mempertahankan kepentingan mereka. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive* dan data yang diperoleh akan diinterpretasikan menggunakan kerangka teori yang relevan.

Kondisi masyarakat tidak terlepas dari apa yang dinamakan kata setuju dan tidak setuju, dalam arti setiap individu dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan konflik. Perbedaan kepentingan ini memunculkan konflik yang kemudian konflik tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengelompokkan masyarakat menjadi dua atau lebih berdasar atas kelompok pada masing-masing pihak yang berkonflik.

Peran pemerintah terhadap eksistensi lembaga masyarakat adalah pengakomodasian kepentingan warga mengenai kepengurusan administratif. Lembaga masyarakat sebagai alat bantu pemerintah dalam mengkoordinir masyarakat. Sedangkan peran pemerintah dalam permasalahan konflik ini adalah sebagai fasilitator. Hal ini dikarenakan lembaga masyarakat adalah milik masyarakat dan urusan pemilihan jabatan sebagai pengurusnya dari masyarakat sendiri dan diperuntukkan kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** *Konflik, Kepentingan, Pemekaran, Kelompok kepentingan.*